

- Boedi Harsono,1973. *Himpunan Peraturan Hukum Agrari Indonesia. Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaanya*. Djmbatan. Jakarata
- Boedi Harsono,2003, *Himpunan Agraria Indonesia , Sejarah Pembentukan UUPA,Isi dan Pelaksanaannya*,Djambatan.Jakarta
- Boedi Harsono,2008,*Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah , Djambatan*,Jakarta.
- Bambang sunggono, 2003, *metodologi Penelitian Hukum*,Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Burhan Asshofa,2007,*Metode Penelitian Hukum*,Rineka Cipta, Jakarta
- Badan Pertanahan Nasional. 1989. *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*,Jakarata.
- Bambang Waluyo,1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,Sinar Gratika.akarta
- Suoriadi , 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Gratika, Jakarta
- Sudargo . Gautama , 1981, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria ,alumni*, Bandung.
- Sudargo . Gautama, 1985, *Hukum Agraria AntarGolongan*,Alumni,Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, liberty,Yogyakarta
- Sri Sayekti,2000, *HukumAgraria Nasional, Universitas Lampung*, Bandar Lampung
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, kencana prenada Media Grup, Jakarta.
- Urip Santoso, 2013, *Pendaftaran dan Peraturan Hak Atas Tanah , kencana prenada Media Grup*, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Taanggunan Atas Tanah berserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional.
- Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Perumahan
- Peratruan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peratruan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah
- Peratruan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria nomor 11 tahun 1961 tentang Bentuk Akta

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan kepala BPN nomor 1 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala BPN RI nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997.

LAMPIRAN